

Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang

Yulia Nafatila¹, M. Hasbi², Asep Rohman³

mhasbi_uin@radenfatah.ac.id², aseprohman_uin@radenfatah.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Keyword

Elimination, Facilities,
Infrastructure, Education

Article History

Submission : 10-03-2025
Revised : 21-03-2025
Publish : 27-03-2025

Abstract

This study aims to understand the process of eliminating facilities and infrastructure, as well as the supporting and inhibiting factors in this process. The researcher employed a qualitative research method with a descriptive qualitative approach. The key informant in this study was the vice principal for facilities and infrastructure, while the supporting informants were the school principal and the head of administration. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To ensure data validity, the researcher used techniques such as increasing persistence and triangulation, which included source triangulation and technique triangulation. The findings indicate that the elimination of facilities and infrastructure at SMP Muhammadiyah 4 Palembang has been adequately implemented. The process is carried out by the vice principal for facilities and infrastructure in direct coordination with the school principal and the disposal team, including the school janitor. The individuals responsible for this task are those with expertise in their respective areas, ensuring the process runs effectively. The elimination process is categorized into four methods: selling, exchanging, donating, and burning. However, the school only applies two methods donation and burning because the items to be discarded are no longer usable and have no resale value, making selling or exchanging ineffective. The supporting factors include human resources and allocated funds, while the inhibiting factor is the limited time available.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan. Sarana pendidikan meliputi segala perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti meja, kursi, papan tulis, buku, dan alat peraga, sedangkan prasarana mencakup fasilitas pendukung seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga (Bararah, 2020; Juita et al., 2024). Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Namun, dalam siklus pengelolaan sarana dan prasarana, terdapat fase yang sering kali terabaikan atau kurang mendapat perhatian, yaitu proses penghapusan sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai.

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah langkah administratif yang bertujuan untuk mengelola barang-barang milik lembaga pendidikan yang sudah tidak memiliki nilai guna, baik karena kerusakan, usang, atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan pembelajaran (Setiyadi et al., 2024; Yufania et al., 2022). Proses ini bukan hanya sekadar membuang barang-barang lama, tetapi juga merupakan bagian dari manajemen aset yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan ini mencakup identifikasi barang, penilaian kondisi, penentuan metode penghapusan, hingga pelaporan dan dokumentasi yang transparan. Tanpa prosedur yang jelas, penghapusan sarana dan prasarana dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pemborosan anggaran hingga kerugian bagi institusi pendidikan.

Salah satu alasan utama perlunya penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya (Nugraha et al., 2024). Sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai dapat menjadi beban bagi institusi pendidikan, baik dari segi ruang penyimpanan, biaya pemeliharaan, maupun keamanan (Saputra et al., 2024; Vanista et al., 2024). Misalnya, meja dan kursi yang rusak tidak hanya memakan tempat tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa jika digunakan tanpa perbaikan. Selain itu, alat peraga yang sudah usang atau tidak sesuai dengan kurikulum terbaru akan menghambat proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas penyampaian materi oleh guru. Dengan demikian, penghapusan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki lembaga pendidikan benar-benar mendukung tujuan pendidikan.

Di sisi lain, penghapusan sarana dan prasarana juga memberikan peluang untuk melakukan pembaruan dan modernisasi fasilitas pendidikan. Perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum menuntut adanya penyesuaian terhadap alat-alat pembelajaran yang digunakan (Sumarlin et al., 2024). Misalnya, alat peraga berbasis digital kini lebih relevan dibandingkan alat peraga konvensional dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dengan menghapus barang-barang yang sudah tidak sesuai, lembaga pendidikan dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inovatif dan menarik bagi siswa.

Proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di Indonesia, pengelolaan barang milik negara atau daerah, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan prosedur penghapusan aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah (Hadiyanti & Nahar, 2018; Sumardi & Muchlis, 2016). Proses ini melibatkan berbagai tahap, seperti penilaian

kondisi barang, persetujuan dari pihak berwenang, hingga pelaksanaan penghapusan yang dapat berupa penjualan, hibah, atau pemusnahan. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penghapusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak merugikan pihak manapun (Iswadi & Iriansyah, 2025).

Namun, pada praktiknya, pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pengelola pendidikan mengenai pentingnya penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai (Ibrahim et al., 2024; Setiyadi et al., 2024). Banyak institusi pendidikan yang cenderung menyimpan barang-barang lama dengan alasan sentimental atau karena tidak adanya prosedur yang jelas untuk penghapusan. Akibatnya, ruang penyimpanan menjadi penuh dengan barang-barang yang tidak berguna, sehingga mengurangi efisiensi penggunaan ruang dan anggaran.

Selain itu, proses penghapusan juga sering terkendala oleh birokrasi yang rumit dan lambat. Proses perizinan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga pemerintah daerah, dapat memakan waktu yang cukup lama. Hal ini sering kali menghambat langkah-langkah penghapusan yang sebenarnya sudah mendesak untuk dilakukan. Di sisi lain, kurangnya transparansi dalam proses penghapusan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa kasus, penghapusan aset dilakukan tanpa prosedur yang jelas, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan atau penyelewengan.

Selain tantangan administratif, terdapat juga tantangan sosial dan budaya yang harus diatasi. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sering kali dianggap sebagai tindakan yang kurang bijaksana, terutama jika barang yang dihapus masih terlihat dalam kondisi baik secara fisik. Padahal, penilaian kelayakan tidak hanya berdasarkan kondisi fisik, tetapi juga relevansi dan efektivitas barang tersebut dalam mendukung proses pembelajaran (Lubis & Fadli, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan semua pemangku kepentingan mengenai pentingnya penghapusan sarana dan prasarana sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen aset, pengelola pendidikan dapat merencanakan dan melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan juga penyederhanaan prosedur administratif agar proses penghapusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi akuntabilitas.

Di sisi lain, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penghapusan juga perlu ditingkatkan. Misalnya, sekolah dapat melibatkan komite sekolah atau masyarakat sekitar dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan terkait penghapusan aset. Dengan demikian, penghapusan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah atau pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, barang-barang yang masih memiliki nilai guna tetapi tidak relevan lagi untuk pendidikan dapat disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilihat sebagai bagian dari siklus pengelolaan aset yang berkelanjutan. Setelah proses penghapusan dilakukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan pengadaan barang baru yang lebih relevan dan berkualitas. Proses ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang mendalam, sehingga pengadaan barang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan tidak menimbulkan pemborosan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, penghapusan sarana dan prasarana tidak hanya menjadi langkah akhir dalam siklus pengelolaan aset, tetapi juga menjadi awal dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi, SMP Muhammadiyah 4 Palembang memiliki keunggulan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, didukung oleh berbagai fasilitas seperti ruang kelas dengan AC dan LCD, meja, kursi, lemari, perpustakaan, ruang audio visual, lobby sekolah, laboratorium komputer,

ruang musik dan seni, ruang bimbingan konseling, ruang OSIS, ruang UKS, ruang kepala sekolah, ruang meeting, ruang guru, ruang staf kurikulum, ruang administrasi, masjid, lapangan olahraga, tempat parkir, dan kantin. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penghapusan tersebut.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang, yang menjadi lokasi utama untuk mengumpulkan data terkait penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti berupaya menggambarkan secara detail fenomena penghapusan sarana dan prasarana serta faktor pendukung dan penghambatnya. Data kualitatif dikumpulkan dalam bentuk narasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan penelitian meliputi informan kunci, yaitu kepala bidang sarana dan prasarana, serta informan pendukung seperti kepala sekolah dan kepala tata usaha. Informan dipilih berdasarkan relevansi dan peran mereka dalam proses penghapusan sarana dan prasarana. Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipasi pasif, di mana peneliti hadir untuk mengamati langsung tanpa berinteraksi secara aktif. Wawancara terstruktur juga dilakukan dengan panduan pertanyaan tertulis dan alat perekam untuk memastikan data akurat (Rukin, 2021). Selain itu, dokumentasi berupa dokumen tertulis, gambar, dan foto digunakan sebagai pelengkap data.

Analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data dalam bentuk narasi terstruktur, serta penarikan kesimpulan guna menjawab fokus penelitian (Gunawan, 2022). Teknik ini bertujuan menghasilkan deskripsi mendalam tentang proses penghapusan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Desain analisis ini memungkinkan peneliti memahami konteks dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan temuan lapangan.

PEMBAHASAN

Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan aset sekolah untuk memastikan keberlangsungan pembelajaran yang efektif. Di SMP Muhammadiyah 4 Palembang, proses ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penjualan, tukar-menukar, penghibahan, dan pembakaran. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, berikut ini adalah penjelasan mendalam terkait praktik penghapusan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 4 Palembang:

Penghapusan dengan dijual/lelang

Hasil penelitian mengenai penghapusan barang atau sarana pendidikan melalui penjualan atau lelang di SMP Muhammadiyah 4 Palembang menunjukkan bahwa sekolah ini tidak melakukan penghapusan melalui metode tersebut. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala bagian sarana dan prasarana, kepala sekolah, serta kepala tata usaha, diperoleh informasi bahwa barang-barang yang ada di sekolah umumnya tidak memiliki nilai jual yang layak sehingga tidak dilakukan penjualan atau lelang. Wakil kepala bagian sarana dan prasarana menjelaskan bahwa barang-barang yang tersedia memiliki harga jual yang rendah dan jika dijual tidak akan memberikan manfaat signifikan. Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa barang yang dijual seharusnya memiliki nilai ekonomis, sedangkan barang yang ada di sekolah dinilai tidak layak untuk dijual karena nilai jualnya sangat rendah atau bahkan tidak ada. Pernyataan ini diperkuat oleh kepala tata usaha yang menegaskan bahwa barang hanya akan dijual jika memang layak dan memiliki nilai jual, tetapi barang-barang di sekolah tidak memenuhi kriteria tersebut.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mendukung pernyataan para informan. Dalam pengamatan di sekolah, peneliti tidak menemukan adanya aktivitas penghapusan barang melalui penjualan atau lelang. Barang-barang yang ada di sekolah terlihat tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup untuk dijual. Dokumentasi yang dikumpulkan juga menunjukkan tidak adanya bukti bahwa sekolah pernah melakukan penjualan atau lelang sebagai metode penghapusan barang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan barang di sekolah ini didasarkan pada penilaian ekonomi barang yang tidak memberikan keuntungan jika dijual.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan barang melalui penjualan atau lelang tidak dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang karena barang-barang yang ada dianggap tidak memenuhi kriteria nilai ekonomis yang layak. Sebagai bukti tambahan, dokumentasi berupa gambar wawancara menunjukkan konsistensi informasi dari para informan terkait kebijakan ini. Keseluruhan data mengindikasikan bahwa pihak sekolah memilih untuk tidak menjual barang yang tidak memberikan nilai tambah atau manfaat finansial. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan upaya sekolah dalam mengelola barang secara efisien berdasarkan kondisi dan nilai ekonomisnya.

Penghapusan dengan tukar-menukar barang

Hasil penelitian mengenai penghapusan barang atau sarana pendidikan melalui tukar-menukar barang di SMP Muhammadiyah 4 Palembang menunjukkan bahwa sekolah ini tidak melakukan proses tukar-menukar barang. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala bagian sarana dan prasarana, kepala sekolah, dan kepala tata usaha, diperoleh informasi yang konsisten bahwa barang-barang yang ada di sekolah tidak memenuhi syarat untuk dilakukan tukar-menukar. Wakil kepala bagian sarana dan prasarana menjelaskan bahwa barang yang ada tidak layak dan kurang efektif untuk dipertukarkan. Hal ini juga diperjelas oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa tukar-menukar barang memerlukan barang yang masih layak dan dapat digunakan kembali, sedangkan kondisi barang di sekolah ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Kepala tata usaha juga menambahkan bahwa meskipun tukar-menukar barang mungkin dapat dilakukan antara dua pihak, namun di sekolah ini barang yang tersedia seringkali tidak dalam kondisi yang cukup baik untuk ditukar. Sebagai gantinya, sekolah ini lebih memilih untuk melakukan penghibahan barang antar sekolah Muhammadiyah jika barang tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti juga mendukung informasi yang disampaikan oleh informan. Selama observasi, peneliti tidak menemukan adanya aktivitas tukar-menukar barang di sekolah. Sebaliknya, barang-barang yang tidak layak digunakan lebih sering dialihkan dengan cara lain, seperti penghibahan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah atau bahkan dibakar jika barang tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dokumentasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa penghapusan barang lebih

sering dilakukan melalui penghibahan daripada tukar-menukar barang.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikumpulkan, peneliti menyimpulkan bahwa SMP Muhammadiyah 4 Palembang tidak pernah melakukan penghapusan barang melalui tukar-menukar. Hal ini dikarenakan barang-barang yang ada tidak layak untuk dipertukarkan, dan jika ada barang yang masih bisa dimanfaatkan, biasanya disalurkan melalui penghibahan. Keputusan ini mencerminkan kebijakan sekolah untuk lebih mengutamakan pemanfaatan barang yang masih berguna bagi pihak lain daripada melakukan tukar-menukar barang yang tidak efektif dan kurang layak. Dengan demikian, sekolah ini lebih memilih cara pengelolaan barang yang lebih efisien dan sesuai dengan kondisi barang yang tersedia.

Penghapusan dengan penghibahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang, penghapusan barang melalui mekanisme tukar-menukar tidak diterapkan di sekolah ini. Hasil wawancara dengan wakil kepala bagian sarana dan prasarana mengungkapkan bahwa tukar-menukar barang tidak dilakukan karena barang yang akan ditukar dianggap tidak layak dan kurang efektif untuk digunakan lebih lanjut. Hal serupa juga disampaikan oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa tukar-menukar barang memerlukan barang yang masih layak digunakan dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Namun, di sekolah ini, barang-barang yang dimiliki umumnya tidak memenuhi kriteria tersebut.

Kepala tata usaha menambahkan bahwa mereka lebih memilih untuk melakukan penghibahan daripada tukar-menukar barang, terutama karena barang yang ada tidak layak untuk ditukar dengan barang lain. Penghibahan sering dilakukan di sekolah ini, terutama dengan sekolah-sekolah lain yang juga berada dalam naungan Muhammadiyah. Proses penghibahan lebih dianggap efektif karena barang yang dihibahkan masih layak digunakan dan bermanfaat bagi pihak yang menerimanya. Penghibahan ini dilakukan atas dasar kebutuhan dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh beberapa sekolah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa proses penghapusan barang di SMP Muhammadiyah 4 Palembang cenderung dilakukan melalui penghibahan atau, dalam beberapa kasus, pembakaran barang yang

sudah tidak layak digunakan. Penghapusan barang melalui tukar-menukar tidak ditemukan, mengingat barang yang ada lebih sering dianggap tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk pertukaran barang. Ini juga disebabkan oleh barang-barang yang dimiliki, seperti meja dan kursi kayu, yang tidak memiliki nilai guna lebih lanjut jika ditukar.

Secara keseluruhan, meskipun mekanisme tukar-menukar barang tidak diterapkan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang, sekolah ini lebih memilih opsi penghibahan barang kepada sekolah-sekolah lain yang membutuhkan. Proses penghibahan barang dilakukan secara selektif, hanya untuk barang yang masih layak pakai dan dapat memberikan manfaat bagi penerima. Dokumentasi dan koordinasi antara pihak terkait, seperti kepala sekolah dan kepala tata usaha, menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa barang yang dihibahkan dapat digunakan secara optimal di sekolah tujuan.

Penghapusan dengan pembakaran

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu metode penghapusan barang atau sarana pendidikan yang sudah tidak layak digunakan di SMP Muhammadiyah 4 Palembang adalah melalui pembakaran. Pembakaran ini dilakukan terhadap barang-barang yang telah mengalami kerusakan parah dan tidak dapat lagi dimanfaatkan atau dihibahkan. Menurut wawancara dengan wakil kepala bagian sarana dan prasarana, barang yang dihapuskan dengan cara dibakar umumnya adalah meja, kursi, atau lemari berbahan kayu yang telah mengalami pelapukan atau rusak berat, seperti tiang meja yang patah atau kursi yang terbelah. Barang-barang yang tidak layak pakai tersebut kemudian diserahkan kepada penjaga sekolah untuk diproses lebih lanjut, apakah akan dibakar atau dibuang.

Proses pembakaran ini dilakukan setelah koordinasi antara wakil kepala sarana dan prasarana serta kepala sekolah. Kepala sekolah menegaskan bahwa barang-barang yang sudah tidak layak lagi digunakan akan dikelola oleh bagian sarana dan prasarana, yang selanjutnya menyerahkan barang tersebut kepada penjaga sekolah untuk dilakukan penghapusan. Pembakaran ini dilakukan di lingkungan sekitar sekolah, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar dan tetap menjaga kebersihan serta keteraturan lingkungan sekolah.

Kepala tata usaha juga menambahkan bahwa pembakaran merupakan solusi terakhir ketika barang tidak dapat lagi digunakan atau dihibahkan, seperti halnya meja, kursi, dan lemari

yang telah mengalami kerusakan berat. Pembakaran ini biasanya dilakukan oleh tim penghapusan yang bekerja sama dengan penjaga sekolah, setelah barang tersebut diperiksa untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar sudah tidak bisa dipakai lagi. Hal ini juga dipastikan agar tidak ada barang yang masih bisa dimanfaatkan oleh pihak lain atau sekolah lain yang membutuhkan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa sebelum proses pembakaran dilakukan, wakil kepala sarana dan prasarana bersama dengan kepala sekolah akan memeriksa barang-barang yang akan dihapuskan. Setelah melakukan pengecekan dan memastikan barang tersebut sudah tidak layak, maka barang tersebut akan diserahkan kepada penjaga sekolah untuk diurus lebih lanjut. Penjaga sekolah kemudian melakukan pembakaran barang-barang tersebut di luar area bangunan sekolah, di sekitar lingkungan sekolah yang telah disediakan untuk proses ini.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pembakaran merupakan langkah terakhir dalam penghapusan sarana yang sudah tidak layak digunakan. Proses ini dijalankan dengan prosedur yang jelas dan terorganisir, serta melibatkan berbagai pihak di sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sarana dan prasarana, serta penjaga sekolah. Dengan demikian, pembakaran sarana yang rusak menjadi cara yang efektif untuk mengelola barang-barang yang sudah tidak berguna, sekaligus menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan sekolah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penghapusan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 4 Palembang ditemukan dalam dua kategori utama, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendukung utama dalam proses penghapusan sarana dan prasarana adalah sumber daya manusia. Semua pihak terkait, mulai dari kepala sekolah, waka sarana dan prasarana, kepala tata usaha, hingga pihak yayasan, memiliki peran penting dalam keberhasilan proses ini. Dalam wawancara dengan kepala sekolah, beliau menekankan bahwa penghapusan sarana dan prasarana di sekolah ini melibatkan koordinasi antara semua pihak, yang bertujuan untuk memberikan masukan dan solusi dalam setiap langkah yang diambil. Begitu pula dengan waka

sarana dan prasarana yang menyatakan bahwa keterlibatan seluruh elemen sekolah akan mempermudah mengatasi kendala yang ada. Keterlibatan berbagai pihak ini, menurut kepala tata usaha, memastikan bahwa proses penghapusan dapat berjalan dengan baik dan tidak terkendala oleh kekurangan informasi atau persetujuan dari pihak-pihak terkait.

Selain itu, faktor dana yang dialokasikan juga menjadi pendukung signifikan dalam penghapusan sarana dan prasarana. SMP Muhammadiyah 4 Palembang telah memperoleh dana yang cukup dari dana BOS, yang digunakan secara efisien untuk membeli perlengkapan sekolah dan mengganti sarana yang sudah rusak. Kepala sekolah dan waka sarana dan prasarana menegaskan bahwa alokasi dana ini mendukung pengadaan barang-barang baru seperti meja, kursi, papan tulis, dan berbagai perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dari hasil observasi, peneliti mencatat bahwa dana yang ada telah dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sekolah, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan penghapusan sarana yang sudah tidak layak.

Namun, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran proses penghapusan sarana dan prasarana. Salah satu faktor penghambat yang utama adalah waktu. Wawancara dengan beberapa informan, termasuk kepala sekolah dan waka sarana dan prasarana, menunjukkan bahwa waktu yang terbatas menjadi tantangan utama dalam proses penghapusan. Kegiatan penghapusan sarana seringkali bertabrakan dengan jam mengajar dan tugas administratif lainnya yang harus dilakukan oleh staf sekolah. Kepala tata usaha juga menambahkan bahwa keterbatasan waktu ini menyebabkan penghapusan sarana dan prasarana memerlukan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan. Hasil observasi peneliti mendukung temuan ini, karena sering kali penghapusan barang tidak dapat dilakukan segera setelah identifikasi kerusakan, melainkan harus menunggu waktu yang lebih luang.

Secara keseluruhan, penghapusan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 4 Palembang didorong oleh faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang terkoordinasi dengan baik dan alokasi dana yang mencukupi. Meskipun demikian, tantangan terkait waktu yang terbatas tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi agar proses penghapusan dapat berlangsung lebih efisien dan tepat waktu.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penghapusan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 4 Palembang merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis serta kondisi barang. Proses penghapusan ini tidak melibatkan penjualan atau lelang karena barang yang ada tidak memiliki nilai jual yang layak. Sebagai gantinya, barang-barang yang tidak lagi digunakan lebih sering dialihkan melalui penghibahan kepada sekolah-sekolah lain dalam naungan Muhammadiyah atau dihancurkan dengan cara pembakaran jika barang tersebut sudah tidak layak pakai. Faktor pendukung utama dalam penghapusan ini adalah keterlibatan sumber daya manusia yang terkoordinasi dengan baik, serta alokasi dana yang memadai untuk pengadaan barang baru. Namun, terdapat kendala waktu yang seringkali menghambat proses penghapusan, karena kegiatan ini harus disesuaikan dengan jadwal aktivitas sekolah lainnya. Meskipun demikian, penghapusan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 4 Palembang dapat berjalan efektif dengan adanya koordinasi yang baik antar pihak terkait, serta pemanfaatan dana yang ada secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bararah, I. (2020). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Mudrrusuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 351–370. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(2), 82–97. <https://doi.org/10.34001/jra.v2i2.127>
- Ibrahim, Pitria, M., & Setyaningsih, K. (2024). Penghapusan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di SMA IBA Palembang. *JIPMuktj: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 6–16. <https://doi.org/10.55943/jipmuktj.v5i1.155>
- Iswadi, & Iriansyah, H. S. (2025). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Juita, G., Jahera, J., Zulkifli, A., & Ananda, R. (2024). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Yang Efektif. *Elementary School*, 11(2), 572–582. <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v11i2.4324>
- Lubis, M. K., & Fadli, M. (2024). Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 102071 Dolok Masihul. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 371–384. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i2.14098>
- Nugraha, A., Hartati, S. S., & M, J. R. (2024). Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Pamijahan. *Journal Educational Management Reviews and Research*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.56406/emrr.v3i1.512>
- Rukin. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Saputra, A., Syuhada, Fahrezi, D. W., & Syafruddin. (2024). Supervisi Sarana Prasarana Dan Keuangan Pendidikan. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 56–66. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4513>
- Setiyadi, B., Ramadhan, B., Ulfa, M., Rosdiati, R., & Putri, T. H. (2024). Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 14(1), 162–169. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v14i1.618>
- Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 69–85. <https://doi.org/10.24252/v7i1.3934>
- Sumarlin, A., Hidayat, A. Al, Yasin, M., Baresi, I. S., Patompo, U., Madiun, S., ... Ilmu, S. T. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah. *Journal of Internasional Multidisciplinary Research*, 2(2), 288–301. <https://doi.org/10.62504/rg88a846>
- Vanista, A., Sulistia, D. S., Nurwahidah, I., Nisa, R., & Azzahra, P. R. (2024). Pengelolaan Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah YPK Cijulang. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(3), 294–300. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i3.306>
- Yufania, N. I., Rifa'i, M. K., & Qomariyah, R. (2022). Inventarisasi dan Penghapusan Sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo. *Jurnal Adminitrasi Pendidikan Islam*, 4(2), 124–135. <https://doi.org/10.15642/JAPI.2019.1.1.124-135>